

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



**"Membangun
Ketahanan Pangan Nasional
Berbasis Sumberdaya Lokal"**

Serang, 2 November 2016

**Fakultas Pertanian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

ISBN : 978-979-19929-3-0

Menilik Kondisi Penyuluhan Sub Sektor Peternakan Dalam Pembangunan Peternakan Sapi Potong di Sumatera Barat

Basril Basyar¹⁾; Nursyirwan Effendi²⁾; James Helliward³⁾; Asmawi⁴⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Doktor pada Prodi. Ilmu Pertanian, Pemusatan Pembangunan
Pertanian, Pascasarjana UNAND; ²⁾ Ketua Komisi Pembimbing; ^{3),4)} Anggota Komisi
Pembimbing

bbbasrilbasyar4@gmail.com / basril_basyar@yahoo.com

Abstrak

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu kiranya mengetahui kondisi terkini dari penyuluhan sub sektor peternakan. Data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan untuk optimalisasi tugas dan fungsi penyuluhan sub sektor peternakan, yaitu sebagai jembatan antara kebijakan, informasi, inovasi dan teknologi untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan peternakan sapi potong di Sumatera Barat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi penyuluhan sub sektor peternakan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa dokumen pemerintahan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan hasil wawancara. Data sekunder didapatkan dari Bakorluh dan Dinas Peternakan Sumatera Barat, sedangkan data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan 9 orang informan yaitu Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Kabid Bidang Produksi, Sekretaris Bakorluh Sumbar dan Kasi penyuluhan peternakan. Fokus data penelitian ini yaitu kondisi kelembagaan penyuluhan, sumber daya manusia penyuluh, dan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah kajian isi dokumen dan teknik interpretatif.

Kata kunci: kelembagaan, kebijakan, penyuluh sub sektor peternakan, optimalisasi

Abstact

Government as a policy makers need to know the latest extension conditions sub-sector livestock. Data and information can be used to formulate a policy for optimizing the tasks and functions of livestock sub-sector extension, that is as a bridge between policy, information, innovation and technology to help achieve development goals beef cattle farms in West Sumatra. Therefore, the purpose of this study was to describe the condition of extension livestock sub-sector in West Sumatra. This research uses descriptive method with qualitative approach. Data used in the form of government documents related to the topic of research, and interviews. Secondary data were obtained from Bakorluh and Livestock Service Office of West Sumatra, while primary data obtained from interviews with four informants, i.e Head of Livestock of West Sumatra, Head of Production, Secretary Bakorluh Sumbar and Kasi farm extension. The focus of this research data that are institutional conditions counseling, human resource extension and extension policy livestock sub-sector. The data analysis method used is a qualitative descriptive and analysis technique used is the study of the contents of the document and interpretative techniques.

Keywords: institutional, policy, extension livestock sub-sector, optimization

Pendahuluan

Sub sektor peternakan memiliki posisi yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, hal ini terlihat dari kandungannya protein yang dihasilkan oleh produk peternakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk dari pertanian tanaman pangan. Sebagai contoh, kandungan protein yang terdapat pada daging dapat mencapai 18,5%, kandungan tersebut jauh lebih tinggi dari tempe (11%) dan tahu (7,5%). Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di subsektor peternakan (Daryanto, A, 2009).

Sampai saat sekarang, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri, karena tidak sebandingnya jumlah permintaan dan produksi daging sapi dalam negeri (RPJMN RI 2014-2019). Buktinya, baru-baru ini pemerintah melakukan impor daging sapi sebesar 10 ribu ton daging beku untuk pemenuhan kebutuhan hari Raya Idul Adha (Arman Sulaiman dalam <https://bisnis.tempo.co>, 2016). Kondisi tersebut mendorong pemerintah terus melakukan pembangunan peternakan sapi potong, salah satunya melalui program swasembada daging sapi, yang dicanangkan semenjak tahun 2000 hingga tahun 2014, namun hasil yang didapatkan belum sesuai target yang diharapkan yaitu kemampuan kita memenuhi 90% kebutuhan dari dalam negeri dan 10%-nya diimpor dari luar negeri (Ariningsih, 2014).

Kenyataannya, produksi daging sapi nasional setiap tahunnya ada memperlihatkan peningkatan yaitu 2,68% pertahun (Kementerian Pertanian, 2015), namun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada bertabahnya permintaan daging sapi nasional (Delgado et al, 1999). Pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional secara mandiri masih terus diusahakan oleh pemerintah, terlihat dari kebijakan yang dikeluarkannya yaitu peningkatan produksi daging dan protein hewani lainnya (telur dan susu) dilakukan melalui kegiatan peningkatan populasi, peningkatan produktivitas ternak, pelayanan pejantan unggul, pelayanan inseminasi buatan yang lebih baik dan penerapan good farming practices, penggemukan dan tunda potong sesuai potensi genetik dan potensi ekonomi ternak, pencegahan pemotongan sapi (ternak) betina produktif, pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengurangi angka mortalitas anak dan induk serta peningkatan mutu genetik ternak melalui seleksi dan persilangan (Kementerian Pertanian, 2015).

Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah Sumatera Barat juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan peternakan sapi potong. Pembangunan peternakan di Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya pemenuhan protein hewani. Arah kebijakannya untuk pembangunan peternakan sapi potong diantaranya adalah membuat wilayah klaster triarga, mengoptimalkan teknologi, merevitalisasi kelembagaan penyuluhan, meningkatkan kualitas sumber daya petani, serta kebijakan lain yang menyertainya (Anonim, 2011).

Berbicara pembangunan peternakan sapi potong, tidak terlepas dari peternak sebagai tulang punggung pelaksana usahatani ternak yang sampai saat ini masih didominasi oleh skala rumah tangga yaitu 16.019 rumah tangga (Kementerian Pertanian, 2013). Peningkatan kualitas SDM peternak merupakan tindakan yang dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan peternakan, dan ini merupakan salah satu arah dari kebijakan pemerintah Sumatera Barat (Anonim, 2011). Tindakan yang didapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan.

Penyuluhan pertanian dibutuhkan untuk memperlancar pencapaian tujuan pembangunan pertanian (Mosher, 1966), karena melalui penyuluhan pertanian dapat dijembatani antara kebijakan dan program pemerintah dengan pelaku utama (petani/peternak), jembatan antara teori-teori dengan prakteknya di lapangan, dimana melalui program penyuluhan yang didalamnya terjadi proses adopsi inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk membantu pencapaian tujuan program pembangunan pertanian, dan juga melalui penyuluhan dapat dilakukan pemberdayaan petani/peternak (Timmer, 1983; Mardikato, 2009). Melalui penyuluhan pertanian dapat memudahkan peternak untuk mengadopsi dan mendifusikan inovasi dengan metode yang tepat dan efektif. Penyuluhan pertanian dapat memperlancar proses komunikasi di bidang peternakan baik secara perorangan maupun kelompok. Melalui penyuluhan jugalah pesan inovasi dibidang peternakan dapat disampaikan, diterima dan diaplikasikan oleh target sasaran yaitu peternak (Sumardjo, 2012).

Beberapa bukti penyuluhan sub sektor peternakan telah berperan dalam kegiatan pembangunan peternakan sapi potong, diantaranya adalah penyuluhan telah mampu meningkatkan pengetahuan peternak (Oswita *at al*, 2013), penyuluhan telah membantu penumbuhan kerjasama yang baik dalam berkelompok dan penyuluhan telah merubah perilaku peternak menjadi inovatif (Isbadi, 2007), penyuluhan telah dapat meningkatkan proses adopsi teknologi peternakan kepada peternak (Abdullah, 2008). Melihat bukti teoritis dan empiris berperannya penyuluhan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan peternakan sapi potong, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan kondisi penyuluhan sub sektor peternakan di Sumatera Barat yang meliputi kondisi kelembagaan penyuluhan, sumber daya manusia penyuluh, dan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Arikunto, 2010). Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Juli s/d Agustus 2016 di kawasan pengembangan peternakan sapi potong Sumatera Barat, yaitu kawasan klaster Tri Arga (Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Bukittinggi dan payakumbuh). Data yang digunakan data sekunder berupa dokumen pemerintahan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan hasil wawancara dengan informan penelitian (Emilia, 2009). Data sekunder didapatkan dari Bakorluh Sumbar, BP4K Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Peternakan Sumatera Barat, sedangkan data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan 9 orang informan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposif. Fokus data penelitian ini yaitu kondisi kelembagaan penyuluhan, sumber daya manusia penyuluh, dan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah kajian isi dokumen dan teknik interpretatif (Miles & Huberman, 1992).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Sumatera Barat

Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan (Undang Undang No.16 Tahun 2006). Keberadaan dan berfungsinya kelembagaan penyuluhan sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi faktor penentu dan bagian dari manajemen untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian,

khususnya dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan peternakan sapi potong di Sumatera Barat.

Lahirnya UU No 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan (SP3K) menyatukan dan mengintegrasikan semua latar belakang penyuluh menjadi satu wadah kelembagaan penyuluhan pada berbagai tingkatan. Pada tingkat kecamatan ada Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, ditingkat kabupaten/ kota ada Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPPELUH) dan ditingkat propinsi ada Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) sementara ditingkat pusat terbentuk Badan Pusat Penyuluhan. Kelembagaan dimasing masing tingkatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun mempunyai tujuan yang sama yakni peningkatan kesejahteraan petani.

Kelembagaan penyuluhan pertanian menurut amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 harus berdiri sendiri, supaya dapat menjamin terselenggaranya:

1. Fungsi perencanaan dan penyusunan program penyuluhan di tingkat Kabupaten Kota dan tersusunnya program di tingkat BPP.
2. Fungsi penebaran dan penyebaran informasi teknologi, model usaha agrobisnis dan pasar bagi petani di pedesaan.
3. Fungsi pengembangan SDM pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan.
4. Penataan administrasi dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian yang berdasarkan kompetensi dan profesionalisme.
5. Kegiatan partisipasi petani-penyuluh dan peneliti.
6. Fungsi supervisi, monitoring, evaluasi serta umpan balik yang positif bagi perencanaan penyuluhan kedepan.

Merujuk pada konsep di atas, perlu kiranya dilihat kondisi kelembagaan penyuluhan pertanian di Sumatera Barat, dimana kelembagaan penyuluhan yang terdapat didaerah ini dimulai dari tingkat pemerintahan provinsi hingga ke tingkat kecamatan. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan kondisi kelembagaan penyuluhan sebagai tempat bernaung para penyuluh pertanian sub sektor peternakan di Sumatera Barat.

Tabel 1. Ikhtisar Pendapat Informan Tentang Kondisi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Setiap Tingkatan di Provinsi Sumatera Barat.

No	Tingkat Kelembagaan	Nama Kelembagaan	Kesesuaiannya Dengan UU No.16 Tahun 2006	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Provinsi	BAKORLUH Sumbar	√	
2	Kabupaten:			
	Agam	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan		√
	Tanah Datar	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan/ Dinas perikanan dan peternakan		√
	Lima Puluh Kota	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)	√	
3	Kota:			
	Bukittinggi	Dinas Pertanian		√
	Payakumbuh	Dinas Pertanian/ Dinas Perikanan dan Peternakan		√
4	Kecamatan	BPP/BPK/BP3K	√	

Sumber: Bakorluh Sumbar, 2016; Kementerian Pertanian, 2014

Berdasarkan Tabel 1 di atas, kelembagaan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan amanat UU No.16 Tahun 2006 adalah pada tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu BAKORLUH Sumbar, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota hanya Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan UU No.16 Tahun 2006 yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah lain yang ada di Sumatera Barat memiliki kelembagaan penyuluhan yang digabung dengan Badan Ketahanan Pangan, bahkan ada daerah yang tidak memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian secara independen, seperti Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan daerah lainnya. Sedangkan untuk kelembagaan di tingkat kecamatan, setiap daerah telah memilikinya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kelembagaan penyuluhan pertanian dibutuhkan untuk memfasilitasi, mengorganisir, melegalkan kebijakan penyuluhan pertanian, melakukan koordinasi pada dinas terkait khususnya Dinas yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan peternakan sapi potong di Sumatera Barat, serta memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan (UU No.16 Tahun 2006). Kelembagaan yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berkedudukan sama dengan SKPD lainnya, sehingga mereka memiliki kewenangan menyusun kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan yang disertai dengan penganggaran kegiatannya masing-masing.

Pada saat daerah hanya menempatkan penyuluhan pertanian pada bidang atau seksi tertentu di Dinas terkait, maka penyuluhan tidak lagi bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif. Dari segi kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada di wilayah pembangunan dan pengembangan peternakan sapi potong Sumatera Barat, terlihat bahwa penyuluhan sub sektor peternakan belum bisa diandalkan sesuai dengan amanat konsep teoritis dan amanat UU no.16 Tahun 2006. Artinya, perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk melakukan pembenahan kelembagaan penyuluhan pertanian di masing-masing daerahnya.

Kondisi Sumberdaya Penyuluh Pertanian Sub Sektor Peternakan Sumatera Barat

Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan disebut dengan penyuluh (UU Nomor 16 Tahun 2006). Penyuluh pertanian di sebut juga dengan panggilan pekerja-penyuluhan atau agen pembaharuan (Kelsey & Hearne (1958); Lippit (1958); Rogers (1983) dalam Mardikanto, 2009), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, penyuluh dibedakan (UU No. 16 Tahun 2006) :

- 1) Penyuluh PNS, yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh.
- 2) Penyuluh Swasta, yaitu penyuluh yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta, dan berasal dari LSM.
- 3) Penyuluh Swadaya, yaitu petani atau warga masyarakat (memiliki kompetensi dibidangnya yang telah diakui) yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan dilingkungannya.

Tugas pokok dari seorang penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan

pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 02 Tahun 2008). Penyuluh pertanian memiliki tugas dan fungsi tambahan berdasarkan jabatan fungsional yang dimilikinya (khusus untuk penyuluh pertanian PNS). Adapun pengelompokan penyuluhan pertanian berdasarkan jabatan fungsionalnya adalah: 1) penyuluh pertanian terampil yaitu penyuluh pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluhan pertanian; dan 2) penyuluh pertanian ahli adalah penyuluh Pertanian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang penyuluhan pertanian (Permentan Nomor 35 Tahun 2009).

Baik berdasarkan status kepegawaian maupun jabatan fungsional yang dimiliki penyuluh pertanian, kompetensi yang baik dan jumlah dari seorang penyuluh pertanian menjadi hal yang dapat menentukan kegiatan penyuluhan pertanian dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian (Kurniawan dan Jahi, 2005; Huda *at al*, 2009). Pendekatan yang digunakan sampai saat sekarang ini untuk tugas penyuluh pertanian adalah *polivalen* (multi komoditas), artinya penyuluh pertanian dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dapat melakukan penyuluhan untuk banyak komoditas pertanian (Murtiani dan Budiman, 2006).

Dapatnya penyuluhan sub sektor peternakan mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan sapi potong di Sumatera Barat, perlu juga dilihat dari segi kondisi SDM penyuluh yang tersedia. Tabel di bawah ini terlihat kondisi SDM penyuluhan pertanian sub sektor peternakan di Sumatera Barat, khususnya di wilayah pengembangan peternakan sapi potong yaitu Kalster Tri Arga.

Tabel 2. Kondisi SDM Penyuluh Pertanian Sub Sektor Peternakan di Wilayah Klaster Tri Arga Provinsi Sumatera Barat.

No	Wilayah Administratif	Jumlah Penyuluh Sub Sektor Peternakan Berdasarkan Status Kepegawaiannya (orang)			Jumlah Penyuluh Sub Sektor Peternakan Berdasarkan Jabatan Fungsional	
		PNS+THL	Swasta	Swadaya	Terampil	Ahli
1	Kab. Agam	10+9	-		10	-
2	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	12	-	-
3	Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-
4	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-
5	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Barat	19	-	12	10	-

Sumber: Bakorluh Sumbar, 2015.

Bila dilihat dari jumlah rumah tangga petani ternak di Sumatera Barat sebanyak 16.019 rumah tangga, tentu jauh sekali perbandingannya dengan penyuluh pertanian sub sektor peternakan di Sumatera Barat yang hanya berjumlah 31 orang penyuluh. Bahkan diantara kelima wilayah Kalster Tri Arga hanya Kabupaten Agam yang memiliki penyuluh pertanian sub sektor peternakan berstatus PNS dan THL, dan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 12 orang penyuluh swadaya pada sub sektor peternakan, sedangkan ketiga wilayah lainnya tidak memiliki penyuluh pertanian sub sektor peternakan.

Kebijakan Penyuluhan Sub Sektor Peternakan Sumatera Barat

Kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan yang dimaksudkan disini, disintesis dari beberapa konsep kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Brigman dan Davis (2005), Kenneth dalam Agustino (2008), dan Young & Quinn (2002), yaitu kegiatan atau keputusan atau tindakan atau program yang dibuat oleh pemerintah untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan penyuluhan sub sektor peternakan supaya dapat mencapai hasil yang memuaskan. Kebijakan tersebut dapat saja bertipologi makro yaitu kebijakan yang bersifat mendasar seperti peraturan daerah pemerintah daerah Sumatera Barat tentang penyuluhan sub sektor peternakan, kebijakan meso yang bersifat penjelas pelaksanaan seperti pertauran Gubernur/Bupati/Walikota, dan kebijakan mikro yang bersifat mengatur pelaksanaan kebijakan pada tingkat di atasnya, seperti peraturan yang dibuat oleh Kepala Dinas dan Kepala Badan (Nugroho, 2006).

Kondisi kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan perlu teridentifikasi keberadaannya, supaya pelaksanaan penyuluhan untuk membantu pencapaian swasembada daging sapi dapat terlaksana sesuai dasar dan aturan yang berlaku. Pada Tabel 3 di bawah ini dapat terlihat ada atau tidaknya kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan yang dibuat oleh pemerintah.

Tabel 3. Ikhtisar Pendapat Informan Tentang Kondisi Kebijakan/Program/Kegiatan Pemerintah Terkait Penyuluhan Sub Sektor Peternakan.

No	Tipologi Kebijakan	Kebijakan	Produk Kebijakan/Program/Kegiatan Spesifik Sub Sektor Peternakan	Produk Kebijakan Pemerintah Yang Menjadi Acuan
1	Makro (kebijakan dasar)	Undang-Undang	Tidak Ada	UU No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		Peraturan Presiden	Tidak Ada	Perpres RI Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
		Peraturan Pemerintah	Tidak Ada	PP Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
		Peraturan Daerah	Tidak Ada	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (Termasuk pembentukan BP4K)
2	Meso (kebijakan penjelasan pelaksanaan)	Peraturan Menteri	Tidak Ada	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

				Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian
				Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya.
		Peraturan Gubernur	Tidak Ada	-
		Peraturan Bupati	Tidak Ada	-
		Peraturan Walikota	Tidak Ada	-
3	Mikro (mengatur pelaksanaan kebijakan)	Programa Pemerintah Pusat	Programa Penyuluhan Pertanian Nasional 2015 yang mencantumkan materi penyuluhan untuk peternakan sapi potong	-
		Programa Provisnis	Programa Bakorluh Sumatera Barat 2016 yang mencantumkan beberapa kegiatan penyuluhan untuk peternakan sapi potong	-
		Programa Kabupaten	Programa BP4K Kab. Lima Puluh Kota 2016 yang mencantumkan beberapa kegiatan penyuluhan untuk peternakan sapi potong	-
			Programa BP4K2P Kab. Agam 2016 yang mencantumkan beberapa kegiatan penyuluhan untuk peternakan sapi potong	-
		Programa Kota	Tidak ada	-

Sumber: hasil wawancara dan studi dokumentasi, 2016

Melihat kondisi kebijakan pemerintah terkait dengan penyuluhan peternakan yang ada pada tabel diatas, membuktikan bahwa penyuluhan sub sektor peternakan untuk komoditi ternak sapi potong, belum mendapat dasar berpijak yang kuat dari kebijakan tingkat makro dan meso. Kebijakan yang ada baru pada tingkat mikro yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan penyuluhan sub sektor peternakan, itupun langsung dalam bentuk tuntunan materi atau kegiatannya. Keadaan yang ada saat ini membuktikan bahwa pemerintah daerah (khususnya Gubernur/Bupati/Walikota), belum menempatkan penyuluhan sebagai alat yang dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan peternakan sapi potong.

Dampak yang ditimbulkannya adalah penganggaran dana yang sedikit dan kegiatan penyuluhan sub sektor peternakan hanya dilaksanakan dalam beberapa kali

pertemuan saja. Tentunya keadaan tersebut akan mengganggu pencapaian tugas dan fungsi penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama (peternak) serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya (UU No 16 Tahun 2006).

Kesimpulan

Bakorluh Sumatera Barat dan BP4K Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh pemerintah Sumbar sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2006, sedangkan daerah lainnya dalam bentuk penggabungan dengan Badan Ketahanan Pangan dan ada daerah yang menjadikan penyuluhan sebagai bahagian dari Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan. Penyuluh pertanian sub sektor peternakan di Sumatera Barat hanya berjumlah 31 orang penyuluh, yang tersebar di Kabupaten Agam sebanyak 19 orang berstatus PNS dan THL, dan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 12 orang penyuluh. Kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan yang ada baru pada tingkat mikro yaitu dalam bentuk tuntunan materi atau kegiatan. Kondisi penyuluhan sub sektor peternakan yang dilihat dari aspek kelembagaan, jumlah penyuluh, dan kebijakan, membuktikan bahwa penyuluhan sub sektor peternakan perlu dilakukan pembenahan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai alat yang dapat membantu pembangunan peternakan di Sumatera Barat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. 2008. Peran Penyuluhan dan Kelompoktani Ternak Untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi Dalam Peternakan Sapi Potong. Prosiding Seminar Nasional Sapi Potong 24 November 2008. Palu.
- Agustino.L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Anonim. 2006. UU No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Anonim. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 02 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Jakarta.
- Anonim. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Jakarta.
- Anonim. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat 2010-2015. Padang.
- Anonim. 2014. Perpres RI Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Arikunto,S. 2010. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ariningsih, E. 2014. Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 32 Nomor 2, hal 137-156.
- Brigman.P & Glyn Davis.2004. *The Australian Policy Handbook. Crows Nest: Allen and Unwin.*

- Delgado, C at al. 1999. *Livestock to 2020 The Nex Food Revolution*. IFPRI, FAO, and ILRI.
- Emilia.E, 2009. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Huda at al. 2009. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian dalam Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka: Kasus Alumni UT di Wilayah Serang, Karawang, Cirebon, dan Tanggamus. *Jurnal Komunikasi Pembangunan Volume 07 Nomor 02 Juli 2009*, Hal 21-31.
- Isbandi.2007. Peran Penyuluhan Dalam Pengembangan Peternakan Sapi Potong Rakyat Pada Masa Pembangunan Peternakan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Penyuluhan Pembangunan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kementerian Pertanian. 2013. *Statistik SDM Petani dan Kelembagaan Petani*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Njendral Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2015. *Outlook Komoditas Pertanian Sub Sektor Peternakan Daging Sapi*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Njendral Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Kurniawan, R dan Jahi, A. 2005. Kompetensi Penyuluh Pertanian di Tujuh Kecamatan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2005*
- Miles, Mathew B, & Huberman A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi). UI-Press.Jakarta.
- Murtiani, S dan Budiman. 2006. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Pedesaan di Jawa Barat. *Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006*. Lambang.
- Nugroho,R. 2009. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Oswita, Y.A at al. 2013. Penyuluhan Untuk Meningkatkan Produksi Sapi Potong di Gapoktan Makmur Jaya Kecamatan Lembah Segar Kota Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian Volume 8 Nomor 2*.
- Sulaiman, A. 2016. Idul Adha "Pemerintah Impor 10 Ribu Ton Daging Beku". *Tempo.Co Bisnis*. Terbitan Selasa 16 Agustus 2016. Diakses pada <https://bisnis.tempo.co>, tanggal 29 September 2016.
- Young dan Quinn.2002. *Writing Effective Public Policy Paper: A Guide of Edvisers in Central and Eastern Europe*. Budapest.



Sertifikat



SEMINAR NASIONAL

Diberikan Kepada :

Ir. Basril Basyar ., MM

Atas Partisipasi sebagai

PEMAKALAH

Pada acara Seminar Nasional Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Untirta dengan tema
" **Membangun Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Sumber Daya Lokal** "
yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2016
di Aula Gedung Hotel Le- dian Kota Serang

Serang, 2 November 2016

Ketua Pelaksana

Dekan

Prof. Dr. Ir. Nurmayulis., MP.

Ketua Jurusan Agribisnis

Dr. Ir. H. Suherman., MM., M.Si.

Yeni Budhiawati., SP., M.EP.